BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU

No. Katalog: 7203007.81

STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI MALUKU 2023

(0911) 361 320 www.maluku.bps.go.id bps8100@bps.go.id

STATISTIK KEUANGAN DAERAH PROVINSI MALUKU 2023

https://maluku.bps.go.id

(0911) 361 320 www.maluku.bps.go.id bps8100@bps.go.id

STATISTIK KEUANGAN DAERAH
PROVINSI MALUKU 2023

ISBN	:	-
No. Publikasi	:	81000.24036
Katalog	:	7203007.81
Ukuran Buku	:	18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman	:	x + 77 Halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku

Gambar Kulit:
Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku

Penerbit:
© Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku

Percetakan:
CV. Nario Sari

Sumber Foto dan Ilustrasi Kulit:
canva.com

https://maluku.bps.go.id

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa ijin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab:
Maritje Pattiwaellapia, SE, M.Si
Kepala BPS Provinsi Maluku

Penyunting:
Ir. Jessica E Pupella, M.Si
Statistisi Ahli Madya

Penulis:
Rahmawati Walio, S. Si
Statistisi Ahli Muda

Tata Letak:
Rahmawati Walio, S. Si

Pengolah Data:
Rahmawati Walio, S. Si

Gambar Kulit:
Rahmawati Walio, S. Si

https://maluku.bps.go.id

Kata Pengantar

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Maluku 2023 merupakan publikasi keempat yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. Publikasi ini bertujuan untuk melengkapi kebutuhan pengguna informasi statistik keuangan daerah.

Publikasi Statistik Keuangan Daerah Provinsi Maluku menyajikan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (realisasi APBD) Pemerintah Provinsi tahun 2022, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 Pemerintah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD) Kabupaten/Kota 2023 dan realisasi APBD Kabupaten/Kota 2022 serta realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa di Seluruh Provinsi Maluku 2023. Data tersebut bersumber dari Kantor Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Maluku, serta responden desa terpilih pada 2023.

Kami menyadari bahwa informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan para pemakai data, baik dari segi kecepatan penyajiannya maupun cakupan data/informasi. Untuk itu bantuan dan kerjasama dari berbagai instansi terutama Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Desa perlu ditingkatkan agar data yang disajikan pada publikasi mendatang jadi lebih baik, lengkap, dan akurat.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga publikasi ini dapat disajikan. Kritik dan saran yang membangun dari pengguna data sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi selanjutnya.

Ambon, September 2024
Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku,

Maritje Pattiwaellapia

https://maluku.bps.go.id

Daftar Isi

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 3

1.2. Ruang Lingkup dan Sumber Data 5

1.3. Tingkat Akurasi 6

BAB II KONSEP DAN DEFINISI **9**

2.1. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 11

2.2. Statistik Keuangan Pemerintah Desa 19

BAB III ULASAN RINGKAS **23**

3.1. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku 25

3.2. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku 32

3.3. Statistik Keuangan Desa di Provinsi Maluku 38

LAMPIRAN **47**

RELATIVE STANDARD ERROR **77**

https://maluku.bps.go.id

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Total Sampel Pendataan Statistik Keuangan Desa di Provinsi Maluku Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2023.....	6
Tabel 3.1	Pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku Menurut Jenis Pendapatan (juta rupiah), 2022-2023.....	26
Tabel 3.2	Kontribusi Pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku Menurut Jenis Pendapatan (Persen), 2022-2023	28
Tabel 3.3	Belanja Pemerintah Provinsi Maluku Menurut Jenis Belanja (juta rupiah), 2022-2023	30
Tabel 3.4	Kontribusi Belanja Pemerintah Provinsi Maluku Menurut Jenis Belanja (Persen), 2022-2023	31
Tabel 3.5	Pendapatan dan Belanja Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku (juta rupiah), 2022-2023	33
Tabel 3.6	Persentase Pendapatan Seluruh Kabupaten/Kota di Maluku Menurut Jenis Pendapatan, 2022-2023	36
Tabel 3.7	Persentase Belanja Daerah Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2022-2023	37
Tabel 3.8	Pendapatan Pemerintah Desa Seluruh Provinsi Maluku Menurut Jenis Pendapatan, 2022-2023	40
Tabel 3.9	Belanja Pemerintah Desa Seluruh Provinsi Maluku Menurut Bidang, 2022 dan 2023.....	42

https://maluku.bps.go.id

Daftar Gambar

Gambar 3.1	Pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku (Juta Rupiah), 2022-2023	27
Gambar 3.2	Belanja Pemerintah Provinsi Maluku Menurut Jenis Belanja (Juta Rupiah), 2022-2023	29
Gambar 3.3	Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa Per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (Juta Rupiah), 2022	41
Gambar 3.4	Realisasi Belanja Pemerintah Desa Per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (Juta Rupiah), 2022	43

https://maluku.bps.go.id

Daftar Lampiran

Tabel 1.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Maluku (Ribu Rupiah), 2022-2023	47
Tabel 2.	Pendapatan dan Belanja Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (Ribu Rupiah), 2022-2023	48
Tabel 3.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, (Ribu Rupiah), 2022-2023	49
Tabel 4.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, (Ribu Rupiah), 2022-2023	50
Tabel 5.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, (Ribu Rupiah), 2022-2023	51
Tabel 6.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, (Ribu Rupiah), 2022-2023	52
Tabel 7.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, (Ribu Rupiah), 2022-2023	53
Tabel 8.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, (Ribu Rupiah), 2022-2023	54
Tabel 9.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, (Ribu Rupiah), 2022-2023	55
Tabel 10.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, (Ribu Rupiah), 2022-2023	56
Tabel 11.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, (Ribu Rupiah), 2022-2023	57
Tabel 12.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku, (Ribu Rupiah), 2022-2023	58
Tabel 13.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Tual, Provinsi Maluku, (Ribu Rupiah), 2022-2023	59
Tabel 14.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Provinsi Maluku Menurut Kab/Kota, (Ribu Rupiah), 2022	60
Tabel 15.	Realisasi Pendapatan dan Belanja Desa Provinsi Maluku Menurut Kab/Kota, (Ribu Rupiah), 2022	61

https://maluku.bps.go.id

Tabel 16.	Anggarab Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Provinsi Maluku menurut Kabupaten/Kota, (Ribu Rupiah), 2023	62
Tabel 17.	Pendapatan dan Belanja seluruh Pemerintah Desa di Provinsi Maluku (Ribu Rupiah), 2022 dan 2023.....	63
Tabel 18.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku, (Rupiah), 2022 dan 2023	64
Tabel 19.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Rupiah), 2022 dan 2023	65
Tabel 20.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Rupiah), 2022 dan 2023	66
Tabel 21.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Kabupaten Buru Provinsi Maluku (Rupiah), 2022 dan 2023	67
Tabel 22.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku (Rupiah), 2022 dan 2023	68
Tabel 23.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku (Rupiah), 2022 dan 2023	69
Tabel 24.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku (Rupiah), 2022 dan 2023	70
Tabel 25.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku (Rupiah), 2022 dan 2023	71
Tabel 26.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Kota Ambon Provinsi Maluku (Rupiah), 2022 dan 2023	72
Tabel 27.	Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Kota Tual Provinsi Maluku (Rupiah), 2022 dan 2023	73

https://maluku.bps.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

https://maluku.bps.go.id

https://maluku.bps.go.id

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah di Indonesia telah membawa konsekuensi terjadinya perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintah di daerah. Kondisi tersebut ditandai dengan semakin banyaknya kewenangan daerah yang dimiliki dan kebijakan pemerintah pusat dalam desentralisasi fiskal yang makin dibatasi.

Seiring dengan perkembangannya, UU tersebut mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang disahkan menggantikan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian dilakukan dua kali perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 melalui UU Nomor 8 tahun 2005 dan UU Nomor 12 tahun 2008. Selanjutnya pemerintah menetapkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.

Saat ini, UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sedangkan untuk Pemerintah Desa menggunakan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya landasan pengelolaan desa menggunakan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang teknisnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus terus ditingkatkan begitu juga dengan peran Pemerintah Desa, selaras

https://maluku.bps.go.id

dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sampai ke Desa serta secara bersama-sama mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah, melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dikelola secara lebih efektif dan efisien.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah program kerja yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD, yaitu dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Oleh karena itu angka-angka yang tertera dalam APBD dan APBDesa bukanlah sekedar angka-angka yang tanpa makna, akan tetapi merupakan program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Desa pada tahun anggaran bersangkutan.

Dalam rangka keperluan analisis dan pengambilan keputusan maupun untuk memenuhi kelengkapan informasi tentang Keuangan Negara dalam berbagai keperluan, maka data statistik tentang keuangan daerah menjadi makin diperlukan, antara lain:

1. Sebagai bahan dalam penyusunan neraca ekonomi baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional seperti pendapatan regional/

https://maluku.bps.go.id

nasional, tabel input-output, dan neraca arus dana.

2. Memberi gambaran tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Desa.
3. Untuk mengetahui potensi dan peran sumber dana dari masing-masing daerah.
4. Sebagai informasi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk masing-masing daerah dibawahnya.

1.2 Ruang Lingkup dan Sumber Data

Data statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang dikumpulkan dalam publikasi ini yaitu:

1. Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi. Data Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Provinsi Maluku.
2. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Data Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dikumpulkan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku.
3. Berbeda dengan cara pengumpulan data Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan sensus (*complete enumeration*), maka pengumpulan data Keuangan Pemerintah Desa dilakukan secara contoh (sampel), yang mana jumlah desa contoh terpilih seluruh Provinsi Maluku berjumlah 183 desa yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku.

https://maluku.bps.go.id

Tabel 1.1 Total Sampel Pendataan Statistik Keuangan Desa di Provinsi Maluku Berdasarkan Kabupaten/Kota, 2023

No	Kabupaten/ Kota	Total Sampel
(1)	(2)	(3)
1	Kepulauan Tanimbar	16
2	Maluku Tenggara	23
3	Maluku Tengah	24
4	Buru	15
5	Kepulauan Aru	16
6	Seram Bagian Barat	16
7	Seram Bagian Timur	22
8	Maluku Barat daya	17
9	Buru Selatan	15
10	Ambon	10
11	Tual	9
	PROVINSI MALUKU	**183**

https://maluku.bps.go.id

1.3 Tingkat Akurasi

Standard error merupakan ukuran akurasi dari suatu prediksi dalam survei. Secara sederhana, *standard error* diartikan sebagai keragaman tiap-tiap nilai amatan dari rata-rata sampel. Ukuran statistik ini dapat melihat akurasi penduga sampel terhadap parameter populasi. *Standard error* dipengaruhi oleh banyaknya sampel. Semakin banyak sampel maka nilainya semakin kecil, yang berarti sampel semakin representatif (mewakili) terhadap populasinya. Namun, *standard error* memiliki keterbatasan yaitu sangat dipengaruhi oleh satuan data yang diamati, sehingga sulit mendapatkan keterbandingan antara dua kelompok data yang mempunyai satuan berbeda.

$$Sd = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}{n-1}}$$

$$SE = \frac{Sd}{\sqrt{n}}$$

Dimana : Sd = *Standard deviasi*
n = banyaknya sampel
y_i = nilai amatan
SE = Standard Error

Dengan keterbatasan ini, *Relative Standard Error* dapat digunakan sebagai alternatif. *Relative Standard Error* (RSE) merupakan ukuran keragaman yang telah dibakukan dengan satuan persen. Persentase yang semakin kecil menginterpretasikan semakin kecil pula keragaman dalam suatu amatan. RSE memiliki tiga kriteria penilaian, apabila RSE kurang dari 25 persen maka hasil estimasi sudah baik, RSE diantara 25-50 persen cukup baik, dan RSE diatas 50 persen mengindikasikan bahwa hasil estimasi kurang baik.

$$RSE = \frac{SE}{\bar{x}}\ x\ 100\%$$

Dimana :
SE = *Standar error*
$\bar{x}$ = rata-rata sampel
RSE = *Relative Standard Error*

https://maluku.bps.go.id

https://maluku.bps.go.id

BAB II

KONSEP DAN DEFINISI

https://maluku.bps.go.id

https://maluku.bps.go.id

Konsep dan Definisi

2.1 Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah realisasi/perhitungan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota pada tiap tahun anggaran.

Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak Daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian golongan C, parkir dan lain-lain.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah meliputi antara lain, pelayanan

https://maluku.bps.go.id

kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pelayanan pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga, ijin mendirikan bangunan, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lainlain.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan daerah yang meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Bagi Hasil Pajak terdiri atas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam terdiri atas iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, pungutan pengusaha perikanan dan hasil

https://maluku.bps.go.id

perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup **kesenjangan fiskal** (*fiscal gap*) dan **pemerataan** kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu **kemandirian** pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus.Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum
2. Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
3. Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah mencakup pendapatan hibah; dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas; dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya; dana penyesuaian dan otonomi khusus dari pemerintah; bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya; dan pendapatan yang sah lainnya.

Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan

https://malukuhps.go.id

keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk di sini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan adalah pemberian bantuan kepada organisasi

https://malukuhps.go.id

kemasyarakatan untuk tujuan sosial, yang dilakukan secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

Bantuan Partai Politik adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan sosial.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri atas :

1. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
2. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
3. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
4. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
5. Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Bantuan keuangan ini terdiri atas :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota

https://maluku.bps.go.id

- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya
- Bantuan keuangan kepada partai Politik

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Langsung adalah bagian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi

https://maluku.bps.go.id

pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan.

Pembiayaan daerah terdiri atas:

1. Penerimaan pembiayaan daerah ;
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
   b. Pencairan dana cadangan
   c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
   d. Penerimaan pinjaman daerah
   e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
   f. Penerimaan piutang daerah
   g. Penerimaan kembali investasi dana bergulir

2. Pengeluaran pembiayaan daerah;
   a. Pembentukan dana cadangan
   b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
   c. Pembayaran Pokok Utang
   d. Pemberian Pinjaman Daerah

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan, pada periode anggaran tahun yang lalu.

https://maluku.bps.go.id

Pencairan Dana Cadangan adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Penerimaan Pinjaman Daerah adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

Penerimaan Piutang Daerah adalah semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintahan yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir adalah semua penerimaan kembali yang berasal dari investasi dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran atau kuasa anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Pembentukan Dana Cadangan adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Saham,

https://maluku.bps.go.id

penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

Pembayaran Pokok Utang adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian pinjaman kepada pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan adalah merupakan selisih lebih dari surplus/defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

2.2 Statistik Keuangan Pemerintah Desa

Aparatur desa/nagari meliputi Kepala Desa/Wali Nagari, Sekretaris Desa/Nagari, Kepala Urusan, Kepala Dusun/Lingkungan/Jorong, dan staf lainnya.

Pegawai tetap adalah pegawai yang bekerja tetap di desa/nagari dan tidak dipengaruhi dengan pergantian Kepala Desa/Wali Nagari. Biasanya pegawai ini berstatus pegawai negeri sipil (PNS).

Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa/Nagari terdiri atas:

Pendapatan Desa Yaitu semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan Asli Desa yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan desa yang bersifat PAD berasal dari masyarakat dan lingkungan desa. Misalnya dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain.

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk

https://maluku.bps.go.id

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yaitu bagian pendapatan daerah yang berasal dari penerimaan pajak yang dikelola oleh pemerintahan di atasnya. Sedangkan bagi hasil retribusi adalah pengembalian sebagian hasil retribusi yang diambil dari usaha maupun bukan usaha dari desa tersebut oleh pemerintah di atasnya.

Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten kota untuk desa paling sedikit 10 persen setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.

Hibah adalah pemberian sumbangan yang biasanya ditujukan bukan dalam Rangka program-program Pemerintah Desa/Nagari. Dana ini dapat berasal baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, badan/lembaga/ organisasi swasta, maupun kelompok masyarakat/perorangan.

Realisasi Belanja Pemerintah Desa terdiri dari :

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain:

a. Penetapan dan penegasan batas Desa
b. Pendataan Desa
c. Penyusunan tata ruang Desa
d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
e. Pengelolaan informasi Desa

https://maluku.bps.go.id

f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
i. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa dan
j. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:

a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa
b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan
d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,
e. Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
f. Pelestarian lingkungan hidup

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
b. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
c. Pembinaan kerukunan umat beragama
d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
e. Pembinaan lembaga adat
f. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat dan
g. Kegiatan lain sesuai kondisi desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan
b. Pelatihan teknologi tepat guna
c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa
d. Peningkatan kapasitas masyarakat

Bidang Tak Terduga

Bidang ini terdiri dari penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

https://maluku.bps.go.id

https://maluku.bps.go.id

BAB III
ULASAN RINGKAS

https://maluku.bps.go.id

(0911) 361 320 www.maluku.bps.go.id bps8100@bps.go.id

https://maluku.bps.go.id

Ulasan Ringkas

3.1 Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku

3.1.1 Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Maluku

Pemerintah Provinsi menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Di dalam APBD tersebut memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya. Penyusunan anggaran tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diupayakan bersumber dari kemampuan keuangan daerah sendiri untuk memacu peningkatan kemandirian daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di daerah tersebut. Daerah dengan kemandirian yang tinggi menunjukan kemampuan untuk melakukan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi transfer dana pusat. Daerah juga lenih leluasa melakukan pengembangan jika kemndirian keuangan tercipta.

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa pada 2022 total realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Maluku adalah sebesar 2,91 triliun rupiah. Komponen terbesar dari total realisasi pendapatan pemerintah Provinsi Maluku adalah Pendapatan Transfer dengan nilai sebesar 2,27 triliun rupiah.

https://maluku.bps.go.id

Tabel 3.1 Pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku Menurut Jenis Pendapatan (juta rupiah), 2022-2023

	Jenis Pendapatan	Realisasi 2022	Anggaran 2023
	(1)	(3)	(4)
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**637.949**	**622.414**
1.1	Pajak Daerah	498.236	450.305
1.2	Retribusi Daerah	19.937	20.925
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.734	24.549
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	97.042	126.635
2	**Pendapatan Transfer**	**2.273.933**	**2.399.032**
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.273.933	2.399.032
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**3.634**	**420**
3.1	Pendapatan Hibah	3.634	420
3.2	Dana Darurat	-	-
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-
	Total Pendapatan Daerah	**2.915.515**	**3.021.866**

https://maluku.bps.go.id

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah. Daerah yang berhasil meningkatkan PAD-nya secara nyata, mengindikasikan bahwa daerah tersebut telah dapat memanfaatkan potensi yang ada secara optimal. Selama periode tahun 2022-2023, PAD mengalami penurunan. Pajak daerah merupakan komponen yang mempunyai kontribusi paling besar terhadap PAD, selanjutnya lain-lain PAD yang sah berada pada peringkat kedua, kemudian diikuti oleh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah.

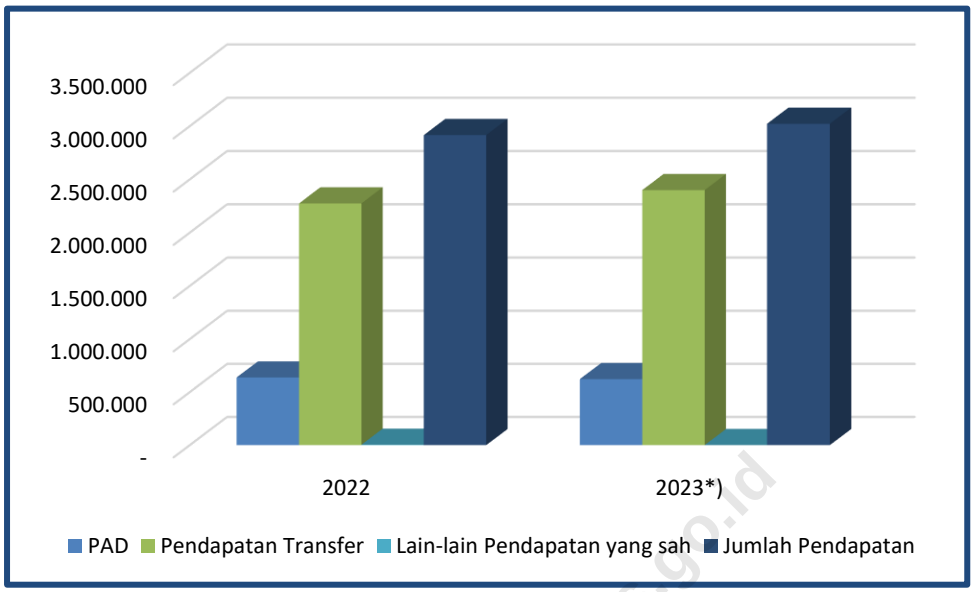

*) Data APBD

Gambar 3.1 Pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku (juta rupiah), 2022-2023

https://maluku.bps.go.id

PAD merupakan hal penting dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Semakin besar peranan PAD dalam APBD, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat, dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil. Jika tingkat kemandirian suatu daerah **"rendah sekali (0-25 persen)"**, dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan yang dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri.

Sedangkan jika suatu daerah memiliki tingkat kemandirian **"rendah (>25-50 persen)",** itu artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah. Kategori **"sedang (>50-75 persen)",** menggambarkan daerah yang sudah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah, sedangkan kategori "**tinggi (>75 persen)**", bisa diartikan bahwa pemerintah daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerahnya.

Pada Tabel 3.2 terlihat Kontribusi PAD terhadap pendapatan pemerintah Provinsi Maluku pada tahun 2022 hingga 2023 berkisar antara 20 sampai dengan 22 persen,

sehingga tingkat kemandirian provinsi Maluku pada tahun-tahun tersebut dikategorikan rendah sekali, hal ini berarti bahwa pemerintah pusat masih memiliki peran yang dominan dibandingkan Pemerintah Provinsi Maluku sendiri.

Tabel 3.2 Kontribusi Pendapatan Pemerintah Provinsi Maluku Menurut Jenis Pendapatan (Persen), 2022-2023

	Jenis Pendapatan	Realisasi 2022	Anggaran 2023
	(1)	(3)	(4)
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**21,88**	**20,60**
1.1	Pajak Daerah	17,09	14,90
1.2	Retribusi Daerah	0,68	0,69
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,78	0.81
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	3,33	4,19
2	**Pendapatan Transfer**	**77,99**	**79,39**
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	77,99	79,39
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**0,12**	**0,01**
3.1	Pendapatan Hibah	0,12	0,01
3.2	Dana Darurat		
3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-
	Total Pendapatan Daerah	**100,00**	**100,00**

https://maluku.bps.go.id

Pajak daerah merupakan komponen PAD yang memiliki kontribusi paling besar. Kontribusi komponen pajak daerah berkisar 14 hingga 17 persen dari total pendapatan daerah. Sedangkan kontribusi komponen PAD lainnya hanya di bawah 5 persen.

Kontribusi pendapatan yang berasal dari pendapatan transfer memiliki kecenderungan meningkat terhadap total pendapatan pada tahun 2022-2023. Penerimaan dari pendapatan transfer ini terdiri dari dua bagian, yaitu:

i) pendapatan transfer pemerintah pusat,

ii) pendapatan transfer antar daerah.

Kontribusi terbesar pada pendapatan transfer ini hanya berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat, hal ini menandakan bahwa ketergantungan pemerintah Provinsi Maluku terhadap bantuan pemerintah pusat berkisar 77-80 persen.

Sumber penerimaan pendapatan daerah yang memiliki kontribusi terkecil adalah lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah dianggarkan mempunyai kontribusi sebesar 0,01 persen pada tahun 2023.

3.1.2 Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Maluku

Realisasi belanja daerah Provinsi Maluku pada kurun waktu 2022-2023 diperkirakan akan mengalami peningkatan,. Meningkatnya realisasi belanja pada tahun 2022-2023 disebabkan oleh peningkatan pada belanja operasi, khususnya pada belanja pegawai.

https://maluku.bps.go.id

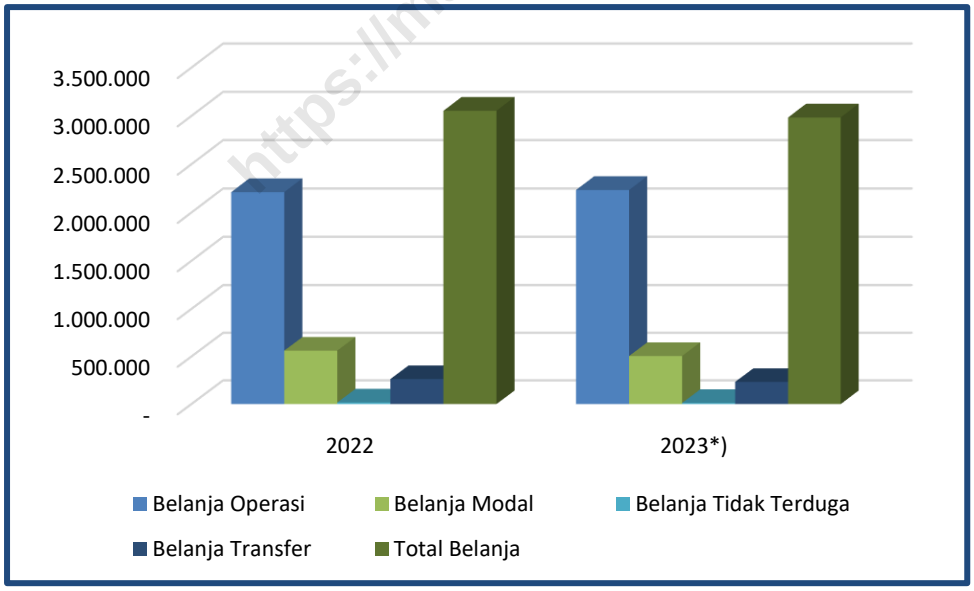

*) Data APBD

Gambar 3.2 Belanja Pemerintah Provinsi Maluku Menurut Jenis Belanja (juta rupiah), 2022-2023

Pada tahun 2023, belanja daerah Provinsi Maluku dianggarkan sebesar 2,98 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 17 persen dibanding realisasi belanja tahun 2022. Dari struktur belanja secara keseluruhan pada Tabel 3.3, dapat dikatakan bahwa komponen belanja didominasi oleh belanja pegawai. Pada tahun 2022, belanja pegawai sebesar 1,02 triliun rupiah dan pada tahun 2023 kembali dianggarkan sebesar 1,09 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 7,57 persen dibandingkan realisasi tahun 2022.

Tabel 3.3 Belanja Pemerintah Provinsi Maluku Menurut Jenis Belanja (juta rupiah), 2022-2023

	Jenis Belanja	Realisasi 2022	Anggaran 2023
	(1)	(3)	(4)
1	**Belanja Operasi**	**2.210.973**	**2.233.336**
	1.1 Belanja Pegawai	1.022.178	1.099.603
	1.2 Belanja Barang dan Jasa	1.026.265	1.003.837
	1.3 Belanja Bunga	1.264	1.011
	1.4 Belanja Subsidi	488	450
	1.5 Belanja Hibah	151.872	121.144
	1.6 Belanja Bantuan Sosial	8.906	7.291
2	**Belanja Modal**	**561.816**	**505.340**
3	**Belanja Tidak Terduga**	**17.420**	**12.227**
4	**Belanja Transfer**	**262.967**	**233.047**
	4.1 Belanja Bagi Hasil	258.748	233.047
	4.2 Belanja Bantuan Keuangan	4.218	-
	Total Belanja Daerah	**3.053.175**	**2.983.951**

https://maluku.bps.go.id

Komponen belanja berikutnya yang dominan adalah belanja barang dan jasa. Pada tahun 2022, belanja ini tercatat sebesar 1,03 triliun rupiah dan pada tahun 2023 dianggarkan sebesar 1,00 triliun rupiah atau mengalami penurunan sebesar 2,19 persen.

Tabel 3.4 menunjukkan kontribusi dari struktur belanja secara keseluruhan, dimana pada tahun 2022 belanja operasi memberikan kontribusi yang lebih besar dari tiga jenis belanja lainnya, yaitu sebesar 86,77 persen diikuti oleh belanja transfer sebesar 10,32 persen, belanja modal sebesar 2,23 persen dan belanja tak terduga sebesar 0,68 persen. Pada tahun 2023, belanja operasi masih menjadi komponen yang memberikan kontribusi terbesar dalam APBD Provinsi Maluku, dimana komposisi belanja pegawai memberikan andil terbesar terhadap total kontribusi belanja operasi yaitu sebesar 36,85 persen, diikuti belanja barang dan jasa 33,64 persen dan belanja hibah 4,06 persen.

https://maluku.bps.go.id

Tabel 3.4 Kontribusi Belanja Pemerintah Provinsi Maluku Menurut Jenis Belanja (Persen), 2022-2023

	Jenis Belanja	Realisasi 2022	Anggaran 2023
	(1)	(3)	(4)
1	**Belanja Operasi**	**86,77**	**74,84**
	1.1 Belanja Pegawai	40,11	36,85
	1.2 Belanja Barang dan Jasa	40,27	33,64
	1.3 Belanja Bunga	0,05	0,03
	1.4 Belanja Subsidi	0,02	0,02
	1.5 Belanja Hibah	5,96	4,06
	1.6 Belanja Bantuan Sosial	0,35	0,24
2	**Belanja Modal**	**2,23**	**16,94**
3	**Belanja Tidak Terduga**	**0,68**	**0,41**
		-	**-**
4	**Belanja Transfer**	**10,32**	**7,81**
	4.1 Belanja Bagi Hasil	10,15	7,81
	4.2 Belanja Bantuan Keuangan	0,17	-
	Total Belanja Daerah	**100,00**	**100,00**

3.2. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku

Pemerintah daerah dituntut menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian daerahnya masing-masing agar dapat terus tumbuh dari tahun ke tahun. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk menaikkan belanja pemerintah. Total belanja daerah (belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja trasnfer) seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku untuk tahun 2023 dianggarkan meningkat 6,87 persen dibandingkan realisasi 2022. Jika pada tahun 2022 realisasi belanja daerah mencapai 10,18 triliun rupiah, maka pada tahun 2023 dianggarkan menjadi 10,88 triliun rupiah.

Sementara itu, pendapatan daerah dalam APBD 2023 ditargetkan mengalami peningkatan dibandingkan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 pendapatan daerah tercatat sebesar 10,01 triliun rupiah lalu dianggarkan naik menjadi 10,74 triliun rupiah pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 7,28 persen. Peningkatan pendapatan ditargetkan oleh kenaikan semua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga Pendapatan Transfer baik Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar daerah.

Sejak tahun 2001, seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, transfer dana dari APBN ke daerah dialokasikan dalam bentuk pendapatan transfer. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat tahun 2023 ditargetkan sebesar 9,80 triliun rupiah, mengalami peningkatan dari 9,24 triliun rupiah pada tahun 2022.

https://maluku.bps.go.id

Tabel 3.5 Pendapatan dan Belanja Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku (juta rupiah), 2022-2023

	Rincian	Realisasi 2022	Anggaran 2023	Pertum buhan
	(1)	(2)	(3)	(4)
A.	**PENDAPATAN DAERAH**	**10.012.598**	**10.741.753**	**7,28**
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**566.509**	**894.172**	**57,84**
1.1	Pajak Daerah	215.735	325.292	50,78
1.2	Retribusi Daerah	133.232	216.349	62,38
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.124	47.134	103,84
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	194.418	305.397	57,08
2	**Pendapatan Transfer**	**9.245.322**	**9.800.988**	**6,01**
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.990.210	9.537.570	6,09
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	255.12	263.418	3,26
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**200.767**	**46.593**	**-76,79**
3.1	Pendapatan Hibah	109.453	7.210	-93,41
3.2	Dana Darurat	-	-	-
3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perudangan-undangan	91.314	39.383	-56,87
B.	**BELANJA DAERAH**	**10.183.620**	**10.833.351**	**6,87**
1	**Belanja Operasi**	**6.621.787**	**7.465.646**	**12,74**
1.1	Belanja Pegawai	3.396.118	4.128.524	21,57
1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.801.763	2.874.310	2,59
1.3	Belanja Bunga	1.230	16.812	1 266,34
1.4	Belanja Subsidi	19.134	9.692	49,34
1.5	Belanja Hibah	279.375	350.930	25,61
1.6	Belanja Bantuan Sosial	124.167	85.378	31,24
2	**Belanja Modal**	**1.992.237**	**1.759.651**	**11,67**
3	**Belanja Tidak Terduga**	**54.514**	**70.779**	**29,84**
4	**Belanja Transfer**	**1.515.082**	**1.587.275**	**4,76**
4.1	Belanja Bagi Hasil	4.995	6.903	38,18
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	1.510.086	1.580.372	4,65
C.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**574.477**	**166.661**	**70,99**

https://maluku.bps.go.id

3.2.1 Pendapatan Daerah

Berbagai cara dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. Pertama, Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kedua, pemerintah kabupaten/kota memperoleh dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan atau dari pemerintah daerah lain. Pengalokasian pendapatan transfer ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Ketiga, pemerintah kabupaten/kota memeperoleh dana dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Komponen pendapatan ini adalah pendapatan yang berasal dari hibah, dana darurat serta lain-lain pendapatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika dilihat dari pendapatan daerah, tampak bahwa pada 2023 dianggarkan meningkat dari realisasi pendapatan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2022. Pendapatan daerah banyak bergantung pada pendapatan transfer yaitu transfer pemerintah pusat , diikuti oleh kontribusi PAD dan pendapatan lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber pendapatan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan perbaikan fasilitas umum. PAD juga merupakan indikator kemandirian daerah. Keberadaan otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur keuangan daerahnya. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menetukan tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam pembangunan daeranya, sehingga tidak selalu bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya.

Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah

https://maluku.bps.go.id

memberikan kemudahan dalam investasi bagi pihak swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya kontribusi PAD terhadap total penerimaan kabupaten/kota. Pertama, masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, tetapi berada diluar wewenang Pemerintah Daerah tersebut. Kedua, BUMD pada umumnya belum beroperasi secara efisien. Ketiga, aktivitas perekonomian daerah kurang bergairah dan belum mendukung situasi kondusif untuk investasi. Keempat, kurang mampunya Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan alternatif. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2023 terhadap total pendapatan daerah ditargetkan mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2022, yaitu dari 5,66 persen menjadi 8,32 persen. Jika dilihat dari nilai nominalnya PAD mengalami kenaikan yaitu dari 566,51 miliar rupiah pada tahun 2022 dianggarkan menjadi 894,17 miliar rupiah pada tahun 2023, atau naik sebesar 57,84 persen (Tabel 3.5).

Sumber utama PAD meliputi Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah, dengan kontribusinya dalam Anggaran 2023 masing-masing sebesar 3,03 persen dan 2,84 persen terhadap total pendapatan. Selain itu, retribusi daerah menyumbang kontribusi sebesar 2,01 persen.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa kontribusi terbesar terhadap pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota bersumber dari pendapatan transfer, dimana dalam realisasi APBD 2022 kontribusinya sebesar 92,34 persen dari total pendapatan dengan komponen terbesarnya yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 89,79 persen dari total pendapatan dengan nilai nominal sebesar 9,24 triliun rupiah. Secara persentase, pada tahun 2023 kontribusi pendapatan transfer pemerintah pusat ditargetkan mengalami penurunan menjadi 88,79 persen.

Pada tahun 2022, komponen pendapatan transfer antar daerah

https://maluku.bps.go.id

memberikan kontribusi sebesar 2,55 persen dan merupakan kontribusi terkecil dalam pendapatan transfer. Dari Lain-Lain Pendapatan yang Sah ditargetkan mengalami penurunan dari 200,77 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 46,59 miliar rupiah pada tahun 2023.

Tabel 3.6 Persentase Pendapatan Seluruh Kabupaten/Kota di Maluku Menurut Jenis Pendapatan, 2022-2023

	Jenis Penerimaan	Realisasi 2022	Anggaran 2023
	(1)	(2)	(3)
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**5,66**	**8,32**
1.1	Pajak Daerah	2,15	3,03
1.2	Retribusi Daerah	1,33	2,01
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,23 -	0,44 -
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	1,94	2,84
2	**Pendapatan Transfer**	**92,34**	**91,24**
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	89,79	88,79
2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	2,55	2,45
3	**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**2,01**	**0,43**
3.1	Pendapatan Hibah	1,09	0,07
3.2	Dana Darurat		
3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perudangan-undangan	0,91	0,37
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	**100,00**	**100,00**

https://maluku.bps.go.id

3.2.2. Belanja Daerah

Belanja pemerintah daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja tak terduga dan belanja transfer pada APBD 2023 dianggarkan naik dibanding realisasi tahun sebelumnya. Belanja operasi dianggarkan naik dari 6,62 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 7,46 triliun rupiah pada tahun 2023 atau naik sebesar 12,74 persen. Begitu juga dengan belanja tidak terduga yang ditargetkan naik dari 54,51 miliar rupiah pada tahun 2022 menjadi 70,78 miliar rupiah pada tahun 2023 atau naik sebesar 29,84 persen dan belanja transfer yang juga ditargetkan naik dari 1,51 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 1,58 triliun rupiah pada tahun 2023 atau naik 4,76 persen.

Sedangkan belanja modal dianggarkan menurun dari 1,99 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 1,76 triliun rupiah pada tahun 2023 atau turun sebesar 11,76 persen.

Dilihat dari kontribusinya, belanja operasi memiliki proporsi terbesar dalam belanja daerah tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 65,02 persen dan dianggarkan meningkat di tahun 2023 menjadi 68,60 persen. Begitu juga dengan kontribusi belanja transfer dan belanja tak terduga pada tahun 2022 masing-masing adalah 14,88 dan 0,54 persen dan meningkat menjadi 14,58 dan 0,65 persen di anggaran 2023 dengan harapan bahwa peningkatan belanja daerah tersebut dapat memacu aparatur daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan publiknya. Sementara itu, kontribusi belanja modal pada tahun 2022 sebesar 19,56 persen dan dianggarkan menurun di tahun 2023 menjadi 16,17 persen.

https://maluku.bps.go.id

Tabel 3.7 Persentase Belanja Daerah Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, 2022-2023

Rincian		Realisasi 2022	Anggaran 2023
(1)		(2)	(3)
1.	**BELANJA OPERASI**	**65,02**	**68,60**
1.1	Belanja Pegawai	33,35	37,93
1.2	Belanja Barang dan Jasa	27,51	26,41
1.3	Belanja Bunga	0,01	0,15
1.4	Belanja Subsidi	0,19	0,09
1.5	Belanja Hibah	2,74	3,22
1.6	Belanja Bantuan Sosial	1,22	0,78
2.	**BELANJA MODAL**	**19,56**	**16,17**
3.	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**0,54**	**0,65**
4.	**BELANJA TRANSFER**	**14,88**	**14,58**
4.1	Belanja Bagi Hasil	0,05	0,06
4.2	Belanja Bantuan Keuangan	14,83	14,52
	TOTAL BELANJA DAERAH	**100,00**	**100,00**

Dari sisi belanja operasi, terlihat bahwa belanja pegawai paling besar menyerap belanja daerah, yaitu sebesar 33,35 persen pada APBD 2022.

Komponen terbesar setelah belanja pegawai pada tahun 2022 berturut-turut adalah belanja barang dan jasa dan belanja hibah. Masing-masing kontribusi komponen tersebut terhadap total belanja daerah adalah 27,51 persen dan 2,74 persen, sementara itu jenis belanja operasi lainnya kurang dari dua persen.

Berbeda dengan belanja operasi, pada belanja transfer terlihat bahwa belanja bantuan keuangan memiliki kontribusi yang paling besar terhadap total pengeluaran daerah tahun 2022 yaitu sebesar 14,83 persen. Kontribusi belanja bantuan keuangan ini diperkirakan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 14,52 persen. Nilai belanja bantuan keuangan pada tahun 2022 sebesar 1,51 triliun rupiah dianggarkan naik menjadi 1,58 triliun rupiah pada tahun 2023. Sedangkan kontribusi terbesar setelah belanja bantuan keuangan untuk tahun 2022 adalah belanja bagi hasil yaitu sebesar 0,05 persen dan dianggarkan naik 38,18 persen pada 2023. Nilai belanja bagi hasil pada Tahun 2022 sebesar 4,99 miliar rupiah dan diaggarkan naik menjadi 6,90 miliar rupiah.

Pembiayaan daerah diperkirakan mengalami penurunan, yaitu dari 574,47 miliar rupiah pada realisasi APBD 2022 menjadi 166,66 miliar rupiah pada anggaran 2023 atau turun sebesar 70,99 persen.

3.3 Statistik Keuangan Desa di Provinsi Maluku

Sejak 2015, pemerintah telah memberikan dana desa kepada desa di Indonesia. Dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diharapkan bisa dikelola oleh pemerintahan desa secara maksimal. Sehingga dapat memperlancar pembangunan yang dilaksanakan di desa dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Setiap tahun, Kepala Desa bersama Badan Permusyarawan Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) melalui peraturan desa. APBDesa merupakan keuangan tahunan Pemerintah Desa, mulai tanggal 1 Januari sampai

https://maluku.bps.go.id

dengan 31 Desember. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.

3.3.1 Pendapatan

APBDesa merupakan bukti otoritas Pemerintah Desa dalam membiayai roda pemerintahan, APBDesa tahun anggaran berikutnya sudah harus dibuat dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tahun berjalan. APBDesa merinci seluruhPendapatan dan Belanja baik rutin maupun pembangunan sebagai pencerminan rencana kegiatan yang akan dilakukan secara bersama-sama oleh aparat dan masyarakt desa.

Tabel 3.8 menunjukan bahwa pada tahun 2022 total realisasi pendapatan pemerintah desa adalah sebesar 1,58 triliun rupiah. Komponen terbesar dari total realisasi anggaan pendapatan pemerintah desa ini adalah pendapatan transfer. Kontribusi pendapatan transfer terhadap total anggaran pendapatan pemerintah desa adalah 99,19 persen atau sebesar 1,57 triliun rupiah. Pendapatan asli desa hanya memberikan kontribusi sebesar 0,44 persen terhadap total realisasi anggaran pendapatan pemerintah desa atau sebesar 7,03 miliar rupiah. Sedangkan 5,74 miliar rupiah sisanya bersumber dari pendapatan lain-lain dengan kontribusi sebesar 0,36 persen.

Pendapatan transfer masih sangat dominan dalam keuangan pemerintah desa. Komponen pendapatan transfer yang memiliki kontribusi terbesar terhadap realisasi pendapatan desa tahun 2022 adalah dana desa yaitu sebesar 988,97 miliar atau sebesar 62,49 persen dari total pendapatan desa. Sumber pendapatan transfer terbesar selanjutnya berasal dari alokasi dana desa. Alokasi dana desa ini berasal dari APBD kabupaten/kota. Alokasi dana desa memiliki kontribusi sebesar 36,52 persen terhadap total pendapatan desa. Sedangkan pendapatan transfer yang bersumber dari bagi hasil pajak dan retribusi, dan bantuan keuangan kabupaten/kota hanya mempunyai kontribusi sekitar 0,16 persen.

Salah satu indikator untuk melihat kemampuan desa dalam

https://maluku.bps.go.id

menyelenggarakan rumah tangganya adalah tingkat optimalisasi Pemerintah Desa dalam menggali sumber dana potensial yang ada di desa yang tercermin dari pendapatan asli desa. Semakin tinggi kontribusi pendapatan asli desa (PADesa) terhadap total penerimaan desa, maka semakin tinggi tingkat kemandirian desa/nagari tersebut.

Tabel 3.8 Pendapatan Pemerintah Desa Seluruh Provinsi Maluku Menurut Jenis Pendapatan 2022-2023

RINCIAN	Nilai (juta rupiah)			Kontribusi (persen)		
	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Anggaran 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Pendapatan Asli Desa	**11.016**	**7.003**	**12.256**	**0,67**	**0,44**	**0,74**
2. Pendapatan Transfer	**1.621.631**	**1.569.719**	**1.624.791**	**98,83**	**99,19**	**98,62**
2.1 Dana Desa	1.004.639	988.967	1.006.922	61,23	62,49	61,12
2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kab/kota	2.947	2.464	6.067	0,18	0,16	0,37
2.3 Alokasi Dana Desa	614.045	577.984	611.802	37,42	36,52	37,14
2.4 Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.5 Bantuan Keuangan Provinsi	-	305	-	-	0,02	-
3. Pendapatan Lain-lain	**8.143**	**5.740**	**10.418**	**0,50**	**0,36**	**0,63**
JUMLAH/TOTAL	**1.640.790**	**1.582.493**	**1.647.466**	**100**	**100**	**100**

https://maluku.bps.go.id

Pada 2023, pendapatan pemerintah desa dianggarkan mencapai 1.647 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2022, nilai ini meningkat sebesar 4,11 persen. Struktur pada anggaran pendapatan 2023 tidak berbeda jika dibandinkan dengan 2022. Pendapatan transfer masih menjadi komponen terbesar pada total anggaran pendapatan desa dengan nilai 1.624 miliar rupiah. Pendapatan asli desa memberikan kontribusi terhadap total anggaran pendapatan desa sebesar 0,74 persen atau sebesar 12.256 juta rupiah. Selanjutnya, pendapatan lain-lain memberikan kontribusi terhadap total anggaran pendapatan desa sebesar 0,63 persen.

Berdasarkan kabupaten/kota, realisasi pendapatan pemerintah desa terbesar berada di Kabupaten Maluku

Tengah, yaitu sebesar 259.639 juta rupiah pada tahun 2022, sementara yang terkecil ada di Kota Tual, yaitu sebesar 50.472 juta rupiah.

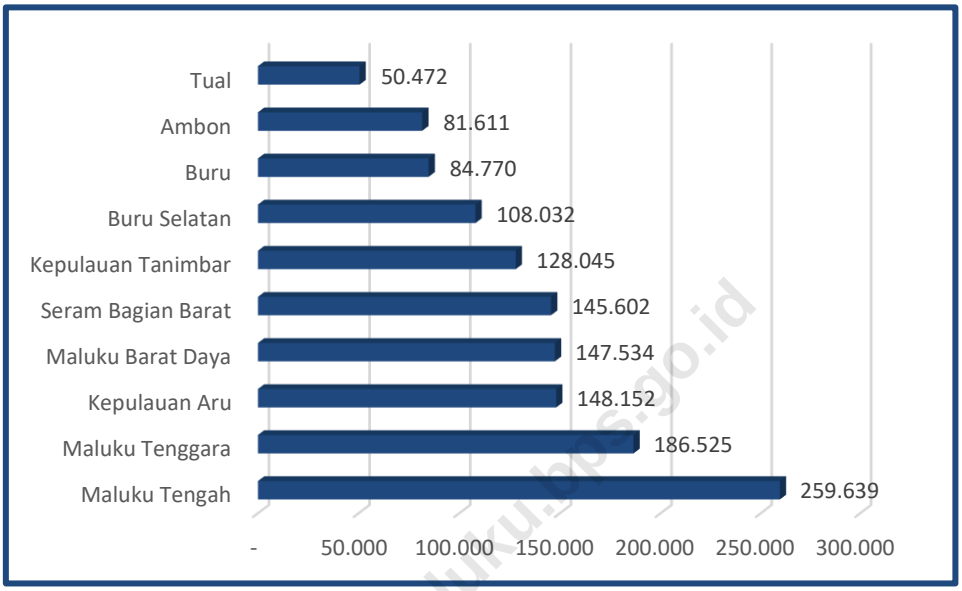

Catatan: Estimasi berdasarkan survei BPS
Kabupaten/kota yang tidak memenuhi sampel minimum: Seram Bagian Timur

Gambar 3.3 Realisasi Pendapatan Pemerintah Desa per kab/kota di Provinsi Maluku (juta rupiah), 2022

https://maluku.bps.go.id

3.3.2 Belanja

Struktur belanja desa Tahun 2022-2023 disajikan dalam tabel 3.9. secara garis besar, Belanja Pemerintah Desa dibagi dalam lima bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Total realiasi belanja pemerintah desa Tahun 2022 sebesar 1.551 miliar rupiah. Pada Tahun 2022, realisasi belanja penyelenggaraan pemerintah desa merupakan yang terbesar yaitu sebesar 36,30 persen atau sebesar 563.316 juta rupiah. Salah satu pengeluaran yang termasuk pada bidang ini yaitu pengeluaran untuk penyelenggaraan belanja penghasilan

tetap, tunjangan, dan operasional pemerintah desa.

Selanjutnya, bidang belanja pemerintah desa yang memiliki kontribusi terbesar kedua dalam realisasi belanja desa Tahun 2022 adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu sebesar 343.315 juta rupiah atau 22,12 persen terhadap total anggaran belanja desa pada 2022.

Tabel 3.9 Belanja Pemerintah Desa Seluruh Provinsi Maluku Menurut Bidang, 2022 dan 2023

Rincian		Nilai (juta rupiah)			Kontribusi (persen)		
		Anggaran 2022	Realisasi 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Anggaran 2023
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	602.990	563.316	623.185	36,43	36,30	37,57
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	360.661	343.315	382.423	21,79	22,12	23,05
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	141.922	133.766	129.991	8,57	8,62	7,84
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	190.925	174.261	200.295	11,54	11,23	12,07
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	358.672	337.220	322.878	21,67	21,73	19,46
	JUMLAH/TOTAL	**1.655.169**	**1.551.878**	**1.658.772**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

https://maluku.bps.go.id

Pengeluaran pada bidang ini salah satunya adalah untuk penyelenggaraan belanja pembangunan dan infrastruktur desa.

Bidang belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak berada pada urutan ketiga bidang yang mempunyai kontribusi besar pada belanja pemerintah desa dengan nilai realisasi belanja sebesar 337.220 juta rupiah atau sebesar 21,73 persen. Pengeluaran pada bidang ini sebagai upaya tanggap darurat desa akibat terjadinya bencana alam, upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin.

Realisasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pembinaan kemasyarakatan pada Tahun 2022 masing-masing menduduki peringkat keempat dan kelima dengan kontribusi masing-masing bidang sebesar 11,23 persen dan 8,62 persen.

Tahun 2023, struktur belanja tidak banyak mengalami perubahan jika dibandingkan pada tahun 2022. Belanja yang dianggarkan terbesar yaitu belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa yaitu sebesar 623.185 juta rupiah. Belanja terbesar kedua yaitu bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan nilai 382.423 juta rupiah. Sementara itu, belanja pembinaan kemasyarakatan memiliki kontribusi terkecil yaitu sebesar 7,84 persen atau sebesar 129.991 juta rupiah.

Berdasarkan kabupaten/kota, realisasi belanja pemerintah desa terbesar berada di Kabupaten Maluku Tengah, yaitu sebesar 259.639 juta rupiah pada tahun 2022, sementara yang terkecil ada di Kota Tual, yaitu sebesar 30.854 juta rupiah.

https://maluku.bps.go.id

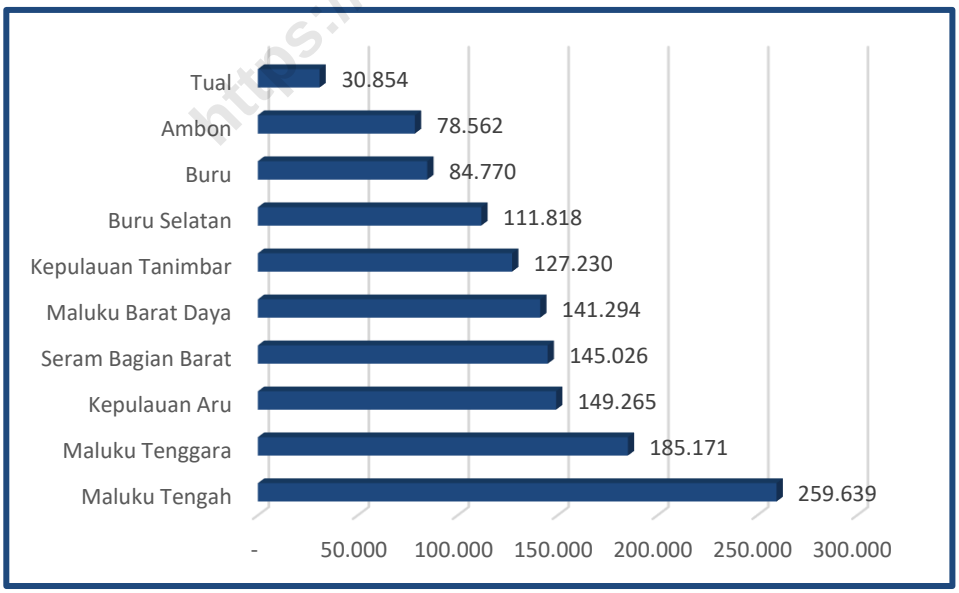

Catatan: Estimasi berdasarkan survei BPS
Kabupaten/kota yang tidak memenuhi sampel minimum: Seram Bagian Timur

Gambar 3.4 Realisasi Belanja Pemerintah Desa per Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (juta rupiah), 2022

https://maluku.bps.go.id

LAMPIRAN

https://maluku.bps.go.id

(0911) 361 320 www.maluku.bps.go.id bps8100@bps.go.id

https://maluku.bps.go.id

Tabel 1. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Maluku (ribu rupiah), 2022-2023

Rincian			Realisasi 2022	Anggaran 2023
(1)			(2)	(3)
A.	**PENDAPATAN DAERAH**		**2 915 515 472**	**3 021 865 996**
	1	**Pendapatan Asli Daerah**	**637 948 959**	**622 414 226**
		1. Pajak Daerah	498 236 258	450 305 186
		2. Retribusi Daerah	19 936 700	20 924 560
		3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	22 733 976	24 549 369
		4. Lain-lain PAD yang Sah	97 042 025	126 635 111
	2	**Pendapatan Transfer**	**2 273 932 596**	**2 399 031 770**
		1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2 273 932 596	2 399 031 770
		2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-
	3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**		
		1. Pendapatan Hibah	3 633 917	420 000
		2. Dana Darurat	-	-
		3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-
B.	**BELANJA DAERAH**		**3 053 175 364**	**2 983 951 052**
	1.	**Belanja Operasi**	**2 210 972 755**	**1 099 602 779**
		1. Belanja Pegawai	1 022 177 819	1 099 602 779
		2. Belanja Barang dan Jasa	1 026 264 903	1 003 837 072
		3. Belanja Bunga	1 264 218	1 011 374
		4. Belanja Subsisi	488 166	450 070
		5. Belanja Hibah	151 872 107	121 144 301
		6. Belanja Bantuan Sosial	8 905 542	7 290 814
	2.	**Belanja Modal**	**561 815 853**	**505 340 322**
	3.	**Belanja Tidak Terduga**	**17 420 246**	**12 227 272**
	4.	**Belanja Transfer**	**262 966 510**	**233 047 048**
		1. Belanja Bagi Hasil	258 748 210	233 047 048
		2. Belanja Bantuan Keuangan	4 218 300	-
C.	**PEMBIAYAAN DAERAH**		**290 439 158**	**-37 914 944**

https://maluku.bps.go.id

Tabel 2. Pendapatan dan Belanja Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (ribu rupiah), 2022-2023

Rincian			Realisasi 2022	Anggaran 2023
(1)			(2)	(3)
A.	**PENDAPATAN DAERAH**		**10 012 598 234**	**10 741 752 667**
	1	**Pendapatan Asli Daerah**	**566 508 738**	**894 171 767**
		1. Pajak Daerah	215 734 914	216 348 718
		2. Retribusi Daerah	133 232 355	216 348 718
		3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	23 123 567	47 134 122
		4. Lain-lain PAD yang Sah	194 417 902	305 397 249
	2	**Pendapatan Transfer**	**9 245 322 224**	**9 800 988 021**
		1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8 990 210 398	9 537 569 861
		2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	255 111 826	263 418 160
	3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**200 767 272**	**46 592 879**
		1. Pendapatan Hibah	109 453 041	7 210 000
		2. Dana Darurat	-	-
		3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	91 314 231	39 382 879
B.	**BELANJA DAERAH**		**10 183 619 880**	**10 883 351 195**
	1.	**Belanja Operasi**	**6 621 787 118**	**7 465 645 717**
		1. Belanja Pegawai	3 396 118 164	4 128 523 624
		2. Belanja Barang dan Jasa	2 801 763 013	2 874 310 120
		3. Belanja Bunga	1 230 431	16 811 914
		4. Belanja Subsisi	18 133 720	9 692 344
		5. Belanja Hibah	279 374 741	350 929 586
		6. Belanja Bantuan Sosial	124 167 049	85 378 129
	2.	**Belanja Modal**	**1 992 237 123**	**1 759 651 265**
	3.	**Belanja Tidak Terduga**	**54 514 130**	**70 779 286**
	4.	**Belanja Transfer**	**1 515 081 509**	**1 587 274 924**
		1. Belanja Bagi Hasil	4 995 388	6 902 596
		2. Belanja Bantuan Keuangan	1 510 086 121	1 580 372 328
C.	**PEMBIAYAAN DAERAH**		**574 476 934**	**166 660 795**

https://maluku.bps.go.id

Tabel 3. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku (ribu rupiah), 2022-2023

Rincian			Realisasi 2022	Anggaran 2023
(1)			(2)	(3)
A.	**PENDAPATAN DAERAH**		**846 398 612**	**857 969 698**
	1	**Pendapatan Asli Daerah**	**26 722 833**	**42 806 230**
		1. Pajak Daerah	5 649 428	9 910 727
		2. Retribusi Daerah	9 594 029	24 236 324
		3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1 785 302	3 244 411
		4. Lain-lain PAD yang Sah	9 694 074	5 414 768
	2	**Pendapatan Transfer**	**797 754 606**	**815 163 468**
		1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	780 360 362	789 965 377
		2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	17 394 244	25 198 091
	3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**21 921 173**	**-**
		1. Pendapatan Hibah	6 984 551	-
		2. Dana Darurat	-	-
		3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	14 936 622	-
B.	**BELANJA DAERAH**		**830 589 207**	**860 421 338**
	1.	**Belanja Operasi**	**570 954 174**	**612 192 221**
		1. Belanja Pegawai	275 607 508	346 635 380
		2. Belanja Barang dan Jasa	271 583 055	263 883 411
		3. Belanja Bunga	-	-
		4. Belanja Subsisi	-	-
		5. Belanja Hibah	20 594 061	170 430
		6. Belanja Bantuan Sosial	3 169 550	1 503 000
	2.	**Belanja Modal**	**132 675 163**	**140 305 233**
	3.	**Belanja Tidak Terduga**	**108 814**	**2 000 000**
	4.	**Belanja Transfer**	**126 851 056**	**105 923 884**
		1. Belanja Bagi Hasil	-	-
		2. Belanja Bantuan Keuangan	126 851 056	105 923 884
C.	**PEMBIAYAAN DAERAH**		**-4 549 421**	**27 259 985**

https://maluku.bps.go.id

Tabel 4. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku (ribu rupiah), 2022-2023

Rincian			Realisasi 2022	Anggaran 2023
(1)			(2)	(3)
A.	**PENDAPATAN DAERAH**		**893 151 890**	**1 029 236 660**
	1	**Pendapatan Asli Daerah**	**53 471 961**	**68 908 556**
		1. Pajak Daerah	12 056 544	32 014 105
		2. Retribusi Daerah	2 559 105	5 903 042
		3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1 789 503	5 200 000
		4. Lain-lain PAD yang Sah	37 066 809	25 791 409
	2	**Pendapatan Transfer**	**828 795 501**	**960 274 104**
		1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	812 246 964	944 941 283
		2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	16 548 537	15 332 821
	3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**10 884 428**	**54 000**
		1. Pendapatan Hibah	-	-
		2. Dana Darurat	-	-
		3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	10 884 428	54 000
B.	**BELANJA DAERAH**		**942 046 176**	**1 004 734 660**
	1.	**Belanja Operasi**	**543 444 953**	**594 927 028**
		1. Belanja Pegawai	240 096 048	274 937 827
		2. Belanja Barang dan Jasa	251 935 384	226 525 267
		3. Belanja Bunga	709 427	4 191 090
		4. Belanja Subsisi	-	-
		5. Belanja Hibah	39 534 258	69 646 044
		6. Belanja Bantuan Sosial	11 169 836	19 626 800
	2.	**Belanja Modal**	**210 488 598**	**227 423 938**
	3.	**Belanja Tidak Terduga**	**668 858**	**3 000 000**
	4.	**Belanja Transfer**	**187 443 767**	**179 383 694**
		1. Belanja Bagi Hasil	3 109 617	3 791 715
		2. Belanja Bantuan Keuangan	184 334 150	175 591 979
C.	**PEMBIAYAAN DAERAH**		**64 658 493**	**-24 502 000**

https://maluku.bps.go.id

Tabel 5. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku (ribu rupiah), 2022-2023

Rincian			Realisasi 2022	Anggaran 2023
(1)			(2)	(3)
A.	**PENDAPATAN DAERAH**		**1 537 672 339**	**1 731 763 649**
	1	**Pendapatan Asli Daerah**	**94 272 196**	**148 458 566**
		1. Pajak Daerah	23 375 054	29 010 000
		2. Retribusi Daerah	48 198 270	71 696 080
		3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	885 094	1 000 000
		4. Lain-lain PAD yang Sah	21 813 778	46 752 486
	2	**Pendapatan Transfer**	**1 370 162 819**	**1 577 095 083**
		1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1 328 177 316	1 518 688 483
		2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	41 985 503	58 406 600
	3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**73 237 324**	**6 210 000**
		1. Pendapatan Hibah	71 301 400	6 210 000
		2. Dana Darurat	-	-
		3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	1 935 924	-
B.	**BELANJA DAERAH**		**1 589 911 221**	**1 757 315 451**
	1.	**Belanja Operasi**	**1 049 442 726**	**1 207 764 871**
		1. Belanja Pegawai	686 322 611	757 772 902
		2. Belanja Barang dan Jasa	325 839 171	382 202 528
		3. Belanja Bunga	-	-
		4. Belanja Subsisi	10 641 639	4 000 000
		5. Belanja Hibah	15 585 414	46 957 400
		6. Belanja Bantuan Sosial	11 053 891	16 832 041
	2.	**Belanja Modal**	**274 176 733**	**272 713 687**
	3.	**Belanja Tidak Terduga**	**3 350 443**	**9 000 000**
	4.	**Belanja Transfer**	**262 941 319**	**267 836 893**
		1. Belanja Bagi Hasil	-	-
		2. Belanja Bantuan Keuangan	262 941 31+	267 836 893
C.	**PEMBIAYAAN DAERAH**		**59 364 891**	**25 551 802**

https://maluku.bps.go.id

Tabel 6. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku (ribu rupiah), 2022-2023

Rincian			Realisasi 2022	Anggaran 2023
(1)			(2)	(3)
A.	**PENDAPATAN DAERAH**		**838 596 345**	**808 981 258**
	1	**Pendapatan Asli Daerah**	**41 466 250**	**39 847 127**
		1. Pajak Daerah	13 060 536	16 042 467
		2. Retribusi Daerah	17 821 312	15 066 349
		3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1 178 844	3 528 424
		4. Lain-lain PAD yang Sah	9 405 558	5 209 887
	2	**Pendapatan Transfer**	**797 130 095**	**763 981 258**
		1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	775 181 074	748 762 784
		2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	21 949 021	15 218 474
	3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**-**	**5 152 873**
		1. Pendapatan Hibah	-	-
		2. Dana Darurat	-	-
		3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	5 152 873
B.	**BELANJA DAERAH**		**798 641 755**	**807 786 082**
	1.	**Belanja Operasi**	**495 594 894**	**558 759 148**
		1. Belanja Pegawai	310 705 198	372 053 419
		2. Belanja Barang dan Jasa	156 437 391	168 335 480
		3. Belanja Bunga	143 142	-
		4. Belanja Subsisi	-	-
		5. Belanja Hibah	21 218 413	12 269 049
		6. Belanja Bantuan Sosial	7 090 750	6 101 200
	2.	**Belanja Modal**	**179 975 471**	**108 278 000**
	3.	**Belanja Tidak Terduga**	**1 612 187**	**11 070 477**
	4.	**Belanja Transfer**	**121 459 203**	**129 678 457**
		1. Belanja Bagi Hasil	1 885 771	3 110 881
		2. Belanja Bantuan Keuangan	119 573 432	126 567 576
C.	**PEMBIAYAAN DAERAH**		**-4 401 268**	**-1 195 176**

https://maluku.bps.go.id

Tabel 7. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku (ribu rupiah), 2022-2023

Rincian			Realisasi 2022	Anggaran 2023
(1)			(2)	(3)
A.	**PENDAPATAN DAERAH**		**754 113 298**	**971 685 793**
	1	**Pendapatan Asli Daerah**	**21 675 157**	**63 943 000**
		1. Pajak Daerah	4 753 889	6 825 210
		2. Retribusi Daerah	7 514 015	16 940 500
		3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2 759 314	4 500 000
		4. Lain-lain PAD yang Sah	6 647 939	35 677 290
	2	**Pendapatan Transfer**	**732 438 141**	**903 942 793**
		1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	721 286 758	889 713 151
		2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	11 151 383	14 229 642
	3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**-**	**3 800 000**
		1. Pendapatan Hibah	-	-
		2. Dana Darurat	-	-
		3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	3 800 000
B.	**BELANJA DAERAH**		**732 623 645**	**987 959 979**
	1.	**Belanja Operasi**	**548 087 970**	**705 698 041**
		1. Belanja Pegawai	231 155 468	307 912 736
		2. Belanja Barang dan Jasa	269 104 411	334 963 281
		3. Belanja Bunga	-	-
		4. Belanja Subsisi	159 944	150 000
		5. Belanja Hibah	42 920 047	58 059 554
		6. Belanja Bantuan Sosial	4 748 100	4 612 470
	2.	**Belanja Modal**	**133 493 134**	**178 812 700**
	3.	**Belanja Tidak Terduga**	**-**	**1 500 270**
	4.	**Belanja Transfer**	**51 042 541**	**101 948 968**
		1. Belanja Bagi Hasil	-	-
		2. Belanja Bantuan Keuangan	51 042 541	101 948 968
C.	**PEMBIAYAAN DAERAH**		**-**	**16 274 186**

https://maluku.bps.go.id

Tabel 8. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku (ribu rupiah), 2022-2023

Rincian			Realisasi 2022	Anggaran 2023
(1)			(2)	(3)
A.	**PENDAPATAN DAERAH**		**905 593 822**	**955 391 523**
	1	**Pendapatan Asli Daerah**	**39 720 628**	**42 000 000**
		1. Pajak Daerah	8 208 138	8 835 002
		2. Retribusi Daerah	3 657 146	2 637 770
		3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1 721 002	3 194 444
		4. Lain-lain PAD yang Sah	26 134 342	27 332 784
	2	**Pendapatan Transfer**	**861 701 837**	**913 391 523**
		1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	839 934 160	893 888 074
		2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	21 767 677	19 503 449
	3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**4 171 357**	**-**
		1. Pendapatan Hibah	4 171 357	-
		2. Dana Darurat	-	-
		3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-
B.	**BELANJA DAERAH**		**938 860 715**	**988 121 933**
	1.	**Belanja Operasi**	**638 400 388**	**703 475 929**
		1. Belanja Pegawai	373 972 747	428 665 063
		2. Belanja Barang dan Jasa	250 554 934	262 022 441
		3. Belanja Bunga	-	-
		4. Belanja Subsisi	-	-
		5. Belanja Hibah	11 345 283	8 760 100
		6. Belanja Bantuan Sosial	2 527 424	4 028 325
	2.	**Belanja Modal**	**147 728 338**	**131 526 188**
	3.	**Belanja Tidak Terduga**	**4 388 788**	**3 826 053**
	4.	**Belanja Transfer**	**148 343 201**	**149 293 763**
		1. Belanja Bagi Hasil	-	-
		2. Belanja Bantuan Keuangan	148 343 201	149 293 763
C.	**PEMBIAYAAN DAERAH**		**72 232 247**	**32 730 410**

https://maluku.bps.go.id

Tabel 9. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku (ribu rupiah), 2022-2023

Rincian			Realisasi 2022	Anggaran 2023
(1)			(2)	(3)
A.	**PENDAPATAN DAERAH**		**950 509 287**	**968 538 070**
	1	**Pendapatan Asli Daerah**	**32 100 979**	**15 146 954**
		1. Pajak Daerah	6 650 236	6 311 714
		2. Retribusi Daerah	539 945	1 529 505
		3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2 580 253	4 591 843
		4. Lain-lain PAD yang Sah	22 330 545	2 713 892
	2	**Pendapatan Transfer**	**871 016 729**	**937 979 040**
		1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	852 671 002	925 873 052
		2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	18 345 727	12 105 076
	3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**47 391 579**	**15 412 076**
		1. Pendapatan Hibah	10 324	-
		2. Dana Darurat	-	-
		3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	47 381 255	15 412 076
B.	**BELANJA DAERAH**		**974 161 629**	**968 284 148**
	1.	**Belanja Operasi**	**582 389 594**	**598 584 050**
		1. Belanja Pegawai	278 169 953	322 351 075
		2. Belanja Barang dan Jasa	214 429 771	216 425 817
		3. Belanja Bunga	-	-
		4. Belanja Subsisi	2 390 119	101 421
		5. Belanja Hibah	45 769 953	44 369 503
		6. Belanja Bantuan Sosial	41 629 798	15 336 234
	2.	**Belanja Modal**	**171 840 252**	**155 159 031**
	3.	**Belanja Tidak Terduga**	**12 529 860**	**6 091 852**
	4.	**Belanja Transfer**	**207 401 923**	**208 449 215**
		1. Belanja Bagi Hasil	-	-
		2. Belanja Bantuan Keuangan	207 401 923	208 449 215
C.	**PEMBIAYAAN DAERAH**		**125 099 610**	**-**

https://maluku.bps.go.id

Tabel 10. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku (ribu rupiah), 2022-2023

Rincian			Realisasi 2022	Anggaran 2023
(1)			(2)	(3)
A.	**PENDAPATAN DAERAH**		**899 119 206**	**1 021 208 016**
	1	**Pendapatan Asli Daerah**	**36 637 458**	**172 861 924**
		1. Pajak Daerah	17 177 697	70 984 178
		2. Retribusi Daerah	3 028 714	10 134 596
		3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3 191 862	10 475 000
		4. Lain-lain PAD yang Sah	13 239 185	81 268 150
	2	**Pendapatan Transfer**	**862 348 548**	**847 346 092**
		1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	847 077 693	841 834 323
		2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	15 270 855	5 511 769
	3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**133 200**	**1 000 000**
		1. Pendapatan Hibah	133 200	1 000 000
		2. Dana Darurat	-	-
		3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-
B.	**BELANJA DAERAH**		**992 797 335**	**1 071 116 177**
	1.	**Belanja Operasi**	**505 724 661**	**644 159 761**
		1. Belanja Pegawai	232 353 489	320 788 555
		2. Belanja Barang dan Jasa	250 561 282	294 855 255
		3. Belanja Bunga	377 862	12 620 824
		4. Belanja Subsisi	-	-
		5. Belanja Hibah	22 432 028	15 895 127
		6. Belanja Bantuan Sosial	-	-
	2.	**Belanja Modal**	**320 251 891**	**255 735 423**
	3.	**Belanja Tidak Terduga**	**7 002 218**	**5 000 000**
	4.	**Belanja Transfer**	**159 818 565**	**166 220 993**
		1. Belanja Bagi Hasil	-	-
		2. Belanja Bantuan Keuangan	159 818 565	166 220 993
C.	**PEMBIAYAAN DAERAH**		**209 346 021**	**49 908 161**

https://maluku.bps.go.id

Tabel 11. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku (ribu rupiah), 2022-2023

Rincian			Realisasi 2022	Anggaran 2023
(1)			(2)	(3)
A.	**PENDAPATAN DAERAH**		**641 418 118**	**672 268 074**
	1	**Pendapatan Asli Daerah**	**18 882 961**	**39 549 746**
		1. Pajak Daerah	3 796 577	6 700 096
		2. Retribusi Daerah	4 012 130	5 331 250
		3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2 487 405	2 800 000
		4. Lain-lain PAD yang Sah	8 586 849	24 718 400
	2	**Pendapatan Transfer**	**622 535 157**	**632 718 328**
		1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	609 273 513	617 364 328
		2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	13 261 644	15 354 000
	3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**-**	**-**
		1. Pendapatan Hibah	-	-
		2. Dana Darurat	-	-
		3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-
B.	**BELANJA DAERAH**		**650 270 827**	**694 151 501**
	1.	**Belanja Operasi**	**436 728 867**	**495 167 227**
		1. Belanja Pegawai	174 457 261	231 343 846
		2. Belanja Barang dan Jasa	231 914 917	210 861 575
		3. Belanja Bunga	-	-
		4. Belanja Subsisi	1 147 200	1 920 000
		5. Belanja Hibah	14 343 891	36 020 398
		6. Belanja Bantuan Sosial	14 865 598	15 021 408
	2.	**Belanja Modal**	**99 804 806**	**76 100 496**
	3.	**Belanja Tidak Terduga**	**2 706 490**	**4 000 000**
	4.	**Belanja Transfer**	**111 030 664**	**118 886 778**
		1. Belanja Bagi Hasil	-	-
		2. Belanja Bantuan Keuangan	111 030 664	118 883 778
C.	**PEMBIAYAAN DAERAH**		**27 855 233**	**21 883 427**

https://maluku.bps.go.id

Tabel 12. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku (ribu rupiah), 2022-2023

Rincian			Realisasi 2022	Anggaran 2023
(1)			(2)	(3)
A.	**PENDAPATAN DAERAH**		**1 114 446 345**	**1 191 106 410**
	1	**Pendapatan Asli Daerah**	**177 889 732**	**228 444 664**
		1. Pajak Daerah	112 581 037	131 553 179
		2. Retribusi Daerah	28 259 858	52 893 302
		3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3 474 091	6 500 000
		4. Lain-lain PAD yang Sah	33 574 746	37 498 183
	2	**Pendapatan Transfer**	**917 963 704**	**962 661 746**
		1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	856 169 194	893 054 420
		2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	61 794 510	69 607 326
	3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**18 592 909**	**-**
		1. Pendapatan Hibah	18 592 909	-
		2. Dana Darurat	-	-
		3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-
B.	**BELANJA DAERAH**		**1 110 263 638**	**1 203 356 410**
	1.	**Belanja Operasi**	**848 262 216**	**932 693 497**
		1. Belanja Pegawai	447 625 233	545 340 934
		2. Belanja Barang dan Jasa	385 759 896	350 747 561
		3. Belanja Bunga	-	-
		4. Belanja Subsisi	4 794 818	3 520 923
		5. Belanja Hibah	9 941 161	32 409 132
		6. Belanja Bantuan Sosial	141 108	674 947
	2.	**Belanja Modal**	**165 242 944**	**152 302 540**
	3.	**Belanja Tidak Terduga**	**16 769 237**	**20 290 637**
	4.	**Belanja Transfer**	**79 989 241**	**98 069 736**
		1. Belanja Bagi Hasil	-	-
		2. Belanja Bantuan Keuangan	79 989 241	98 069 736
C.	**PEMBIAYAAN DAERAH**		**812 632**	**12 250 000**

https://maluku.bps.go.id

Tabel 13. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Tual, Provinsi Maluku (ribu rupiah), 2022-2023

Rincian			Realisasi 2022	Anggaran 2023
(1)			(2)	(3)
A.	**PENDAPATAN DAERAH**		**631 578 972**	**533 603 516**
	1	**Pendapatan Asli Daerah**	**23 668 583**	**32 205 000**
		1. Pajak Daerah	8 425 778	7 105 000
		2. Retribusi Daerah	8 047 831	9 980 000
		3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1 270 897	2 100 000
		4. Lain-lain PAD yang Sah	5 924 077	13 020 000
	2	**Pendapatan Transfer**	**583 475 087**	**486 434 586**
		1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	567 832 362	473 484 586
		2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	15 642 725	12 950 000
	3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**24 435 302**	**14 963 930**
		1. Pendapatan Hibah	8 259 300	-
		2. Dana Darurat	-	-
		3. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	16 176 002	14 963 930
B.	**BELANJA DAERAH**		**623 453 732**	**540 103 516**
	1.	**Belanja Operasi**	**402 756 675**	**412 223 944**
		1. Belanja Pegawai	145 652 648	220 721 887
		2. Belanja Barang dan Jasa	193 642 801	163 487 504
		3. Belanja Bunga	-	-
		4. Belanja Subsisi	-	-
		5. Belanja Hibah	35 690 232	26 372 849
		6. Belanja Bantuan Sosial	27 770 994	1 641 704
	2.	**Belanja Modal**	**156 559 793**	**61 294 029**
	3.	**Belanja Tidak Terduga**	**5 377 235**	**5 000 000**
	4.	**Belanja Transfer**	**58 760 029**	**61 585 543**
		1. Belanja Bagi Hasil	-	-
		2. Belanja Bantuan Keuangan	58 760 029	61 585 543
C.	**PEMBIAYAAN DAERAH**		**24 058 496**	**6 500 000**

https://maluku.bps.go.id

Tabel 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Provinsi Maluku menurut Kabupaten/Kota (rupiah), 2022

Kabupaten/Kota		Anggaran		
		Pendapatan	Belanja	Pembiayaan
(1)		(2)	(3)	(4)
01	Kepulauan Tanimbar	131 394 319 846	133 411 980 829	2 017 664 384
02	Maluku Tenggara	186 984 144 512	188 257 308 691	1 286 171 624
03	Maluku Tengah	259 680 468 992	259 680 468 992	-
04	Buru	84 770 373 632	84 770 373 632	-
05	Kepulauan Aru	156 929 078 784	155 655 887 715	1 357 883 648
06	Seram Bagian Barat	147 701 159 384	156 262 600 233	10 302 624 324
08	Maluku Barat Daya	156 035 971 840	145 856 060 380	2 031 686 400
09	Buru Selatan	122 600 655 762	128 882 987 398	6 282 338 816
71	Ambon	92 812 586 560	96 470 106 510	3 657 520 640
72	Tual	52 001 044 480	52 001 043 499	-
MALUKU		**1 640 789 782 632**	**1 655 169 092 989**	**33 361 571 328**

https://maluku.bps.go.id

Catatan: Estimasi berdasarkan Survei BPS

Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi sampel minimum: Seram Bagian Timur

Tabel 15. Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Provinsi Maluku menurut Kabupaten/Kota (rupiah), 2022

Kabupaten/Kota		Realisasi		
		Pendapatan	Belanja	Pembiayaan
(1)		(2)	(3)	(4)
01	Kepulauan Tanimbar	128 045 383 350	127 230 295 540	1 950 073 536
02	Maluku Tenggara	186 524 719 604	185 170 615 811	1 190 039 424
03	Maluku Tengah	259 638 976 512	259 638 973 403	-
04	Buru	84 770 373 632	84 770 373 632	-
05	Kepulauan Aru	148 152 188 416	149 264 753 092	5 682 692 608
06	Seram Bagian Barat	145 602 480 329	145 025 802 069	2 589 852 544
08	Maluku Barat Daya	147 533 649 488	141 294 466 972	1 141 240 960
09	Buru Selatan	108 032 159 992	111 817 632 234	5 031 233 024
71	Ambon	81 611 075 200	78 561 778 686	3 677 395 456
72	Tual	50 472 194 048	30 854 235 070	-
MALUKU		**1 582 493 414 640**	**1 551 899 755 700**	**24 991 034 368**

https://maluku.bps.go.id

Catatan: Estimasi berdasarkan Survei BPS

Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi sampel minimum: Seram Bagian Timur

Tabel 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Provinsi Maluku menurut Kabupaten/Kota (rupiah), 2023

Kabupaten/Kota		Anggaran		
		Pendapatan	Belanja	Pembiayaan
(1)		(2)	(3)	(4)
01	Kepulauan Tanimbar	116 741 208 644	117 129 950 091	2 487 359 744
02	Maluku Tenggara	18 042 585 921	185 179 136 236	2 136 550 315
03	Maluku Tengah	257 010 616 380	257 010 614 226	-
04	Buru	154 269 046 190	152 599 053 492	-1 669 988 864
05	Kepulauan Aru	139 871 354 880	139 871 350 276	352 715 168
06	Seram Bagian Barat	137 135 116 056	141 280 822 673	4 358 465 016
08	Maluku Barat Daya	141 521 600 512	141 521 600 512	-
09	Buru Selatan	123 867 803 648	124 777 325 040	909 524 096
71	Ambon	100 175 932 816	100 075 932 816	-
72	Tual	45 334 491 136	48 444 821 621	3 187 462 064
MALUKU		**1 647 465 490 296**	**1 658 772 064 348**	**14 542 098 688**

https://maluku.bps.go.id

Catatan: Estimasi berdasarkan Survei BPS

Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi sampel minimum: Seram Bagian Timur

Tabel 17. Pendapatan dan Belanja Seluruh Pemerintah Desa di Provinsi Maluku (rupiah), 2022 dan 2023

RINCIAN	2022		2023
	Anggaran	Realisasi	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PENDAPATAN	**1 640 789 782 632**	**1 582 493 414 640**	**1 647 465 490 296**
1. Pendapatan Asli Desa	11 016 383 488	7 033 445 376	12 256 116 936
2. Pendapatan Transfer	1 621 630 681 856	1 569 719 488 096	1 624 791 371 264
2.1 Dana Desa	1 004 639 158 272	988 966 551 552	1 006 922 170 368
2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	2 946 532 096	2 463 663 104	6 067 244 544
2.3 Alokasi Dana Desa	614 044 991 488	577 984 004 096	611 801 956 352
2.4 Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-
2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	-	305 269 344	-
3. Pendapatan Lain-lain	8 142 717 288	5 740 481 168	10 418 002 096
II. BELANJA DAERAH	**1 655 169 092 989**	**1 551 877 755 700**	**1 658 772 064 348**
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	602 989 872 832	563 315 917 712	623 185 309 760
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	360 661 260 672	343 315 383 168	382 422 981 760
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	141 921 566 208	133 765 828 608	129 990 991 996
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	190 924 596 036	174 260 639 268	200 294 692 640
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	358 671 797 241	337 219 986 944	322 878 088 192
III. PEMBIAYAAN	**33 361 571 328**	**24 991 034 368**	**14 542 098 688**

Catatan: Estimasi berdasarkan Survei BPS

https://maluku.bps.go.id

Tabel 18. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku (rupiah), 2022 dan 2023

RINCIAN	2022		2023
	Anggaran	Realisasi	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PENDAPATAN	**131 394 319 846**	**128 045 383 350**	**116 741 208 644**
1. Pendapatan Asli Desa	5 183 329 280	2 257 261 632	5 647 033 856
2. Pendapatan Transfer	126 185 050 112	125 776 826 368	110 051 700 736
2.1 Dana Desa	72 956 649 472	72 674 312 192	70 583 459 840
2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	-	-	-
2.3 Alokasi Dana Desa	53 228 400 640	53 102 514 176	39 468 240 896
2.4 Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-
2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	-
3. Pendapatan Lain-lain	25 940 454	11 295 350	1 042 474 052
II. BELANJA DAERAH	**133 411 980 829**	**127 230 295 540**	**117 129 950 091**
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	48 893 931 150	46 315 909 872	45 672 777 476
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	26 015 881 748	24 223 629 533	39 924 875 804
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	12 460 208 715	11 640 683 527	6 951 058 710
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	10 510 514 608	9 713 718 176	9 882 354 807
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	35 531 444 608	35 336 354 432	14 698 883 294
III. PEMBIAYAAN	**2 017 664 384**	**1 950 073 536**	**2 487 359 744**

Catatan: Estimasi berdasarkan Survei BPS

https://maluku.bps.go.id

Tabel 19. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa, Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (rupiah), 2022 dan 2023

RINCIAN	2022		2023
	Anggaran	Realisasi	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PENDAPATAN	**186 984 144 512**	**186 524 719 604**	**183 042 585 921**
1. Pendapatan Asli Desa	1 344 026 496	1 225 406 784	1 613 927 149
2. Pendapatan Transfer	185 640 118 016	185 259 151 360	181 404 388 352
2.1 Dana Desa	137 506 521 088	137 499 541 504	145 980 391 424
2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	2 578 052 864	2 155 569 152	145 980 391 424
2.3 Alokasi Dana Desa	45 555 544 064	45 604 040 704	31 408 969 728
2.4 Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-
2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	-
3. Pendapatan Lain-lain	-	40 161 460	24 270 420
II. BELANJA DAERAH	**188 257 308 691**	**185 170 615 811**	**185 179 136 236**
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	52 959 702 671	51 414 211 279	55 457 997 516
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	42 391 876 960	42 068 738 080	37 814 407 384
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	20 297 374 568	20 023 977 320	22 001 966 396
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	39 518 295 212	38 951 706 284	33 150 974 988
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	33 090 059 280	32 711 982 848	36 753 789 952
III. PEMBIAYAAN	**1 286 171 624**	**1 190 039 424**	**2 136 550 315**

Catatan: Estimasi berdasarkan Survei BPS

https://maluku.bps.go.id

Tabel 20. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (rupiah), 2022 dan 2023

RINCIAN	2022		2023
	Anggaran	Realisasi	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PENDAPATAN	**259 680 468 992**	**259 638 976 512**	**257 010 616 380**
1. Pendapatan Asli Desa	-	-	222 152 116
2. Pendapatan Transfer	259 680 468 992	258 638 976 512	256 668 049 408
2.1 Dana Desa	167 711 621 120	167 711 621 120	168 050 556 928
2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	-	-	-
2.3 Alokasi Dana Desa	91 968 847 872	91 927 355 392	88 617 492 480
2.4 Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-
2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	-
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	120 414 856
II. BELANJA DAERAH	**259 680 468 992**	**259 638 973 403**	**257 010 614 226**
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	91 676 075 952	91 660 529 680	91 115 243 712
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	52 066 254 688	52 060 917 904	50 260 058 304
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	19 816 534 368	19 814 235 168	19 242 935 872
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	28 237 382 712	28 231 995 088	28 320 323 248
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	67 884 221 272	67 871 295 563	68 072 053 090
III. PEMBIAYAAN	**-**	**-**	**-**

Catatan: Estimasi berdasarkan Survei BPS

https://maluku.bps.go.id

Tabel 21. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa, Kabupaten Buru Provinsi Maluku (rupiah), 2022 dan 2023

RINCIAN	2022		2023
	Anggaran	Realisasi	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PENDAPATAN	**84 770 373 632**	**84 770 373 632**	**154 269 046 190**
1. Pendapatan Asli Desa	-	-	27 313 454
2. Pendapatan Transfer	84 770 373 632	84 770 373 632	154 241 732 736
2.1 Dana Desa	70 624 108 544	70 624 108 544	72 482 996 224
2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	-	-	1 298 272 384
2.3 Alokasi Dana Desa	14 146 265 088	14 146 265 088	80 460 464 128
2.4 Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-
2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	-
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	-
II. BELANJA DAERAH	**84 770 373 632**	**84 770 373 632**	**152 599 053 492**
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	33 759 975 472	33 759 975 472	60 754 492 736
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	23 582 439 408	23 582 439 408	37 707 618 912
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	13 176 300 224	13 176 300 224	20 291 387 180
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	5 402 946 048	5 402 946 048	11 837 855 136
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	8 848 712 480	8 848 712 480	22 007 699 528
III. PEMBIAYAAN	**-**	**-**	**-1 669 988 864**

Catatan: Estimasi berdasarkan Survei BPS

https://maluku.bps.go.id

Tabel 22. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku (rupiah), 2022 dan 2023

RINCIAN	2022		2023
	Anggaran	Realisasi	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PENDAPATAN	**156 929 078 784**	**148 152 188 416**	**139 871 354 880**
1. Pendapatan Asli Desa	-	-	-
2. Pendapatan Transfer	149 981 540 352	143 314 558 976	131 914 264 576
2.1 Dana Desa	97 374 814 208	97 374 814 208	96 506 994 688
2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	-	-	-
2.3 Alokasi Dana Desa	52 606 726 144	45 939 744 768	35 407 269 888
2.4 Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-
2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	-
3. Pendapatan Lain-lain	6 947 538 432	4 837 629 440	7 957 090 304
II. BELANJA DAERAH	**155 655 887 716**	**149 264 753 092**	**139 871 350 276**
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	61 111 939 312	58 254 236 304	52 061 817 276
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	38 651 667 232	39 848 246 672	19 113 501 248
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	19 826 517 504	19 272 143 104	8 074 659 824
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	12 236 423 296	11 004 726 952	17 832 452 096
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	23 829 340 372	20 885 400 060	42 788 919 832
III. PEMBIAYAAN	**1 357 883 648**	**5 682 692 608**	**352 715 168**

Catatan: Estimasi berdasarkan Survei BPS

https://maluku.bps.go.id

Tabel 23. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa, Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku (rupiah), 2022 dan 2023

RINCIAN	2022		2023
	Anggaran	Realisasi	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PENDAPATAN	**147 701 159 384**	**145 602 480 329**	**137 135 116 056**
1. Pendapatan Asli Desa	1 247 805 568	1 116 851 200	1 563 115 776
2. Pendapatan Transfer	146 407 620 608	144 479 336 896	135 561 773 056
2.1 Dana Desa	90 038 329 344	87 178 461 184	79 130 165 248
2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	-	-	-
2.3 Alokasi Dana Desa	56 369 291 264	57 080 881 152	56 431 607 808
2.4 Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-
2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	-	219 994 560	-
3. Pendapatan Lain-lain	45 733 208	6 292 233	10 227 224
II. BELANJA DAERAH	**156 262 600 233**	**145 025 802 069**	**141 280 822 673**
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	51 843 436 590	48 713 405 854	53 050 942 428
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	33 872 614 678	30 255 464 123	43 897 718 384
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	9 925 319 949	9 029 723 444	8 474 623 373
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	15 598 207 960	14 812 144 584	13 766 263 672
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	45 023 021 056	42 215 064 064	22 091 274816
III. PEMBIAYAAN	**10 302 624 324**	**2 589 852 544**	**4 358 465 016**

Catatan: Estimasi berdasarkan Survei BPS

https://maluku.bps.go.id

Tabel 24. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa, Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku (rupiah), 2022 dan 2023

RINCIAN	2022		2023
	Anggaran	Realisasi	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PENDAPATAN	**156 035 971 840**	**147 533 649 488**	**141 521 600 512**
1. Pendapatan Asli Desa	352 836 352	114 923 088	-
2. Pendapatan Transfer	155 683 135 488	147 418 726 400	141 521 600 512
2.1 Dana Desa	94 280 056 832	87 121 813 504	101 092 851 712
2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	-	-	-
2.3 Alokasi Dana Desa	61 403 078 656	60 296 912 896	40 428 748 800
2.4 Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-
2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	-
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	-
II. BELANJA DAERAH	**145 856 060 380**	**141 294 466 972**	**141 521 600 512**
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	56 325 458 296	55 922 550 032	52 724 177 801
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	24 794 190 596	28 122 783 612	19 178 811 648
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	7 282 799 056	7 937 391 120	8 123 306 045
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	15 481 904 784	14 485 278 720	18 089 895 872
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	41 971 707 648	34 826 463 488	43 405 409 146
III. PEMBIAYAAN	**2 031 686 400**	**1 141 240 960**	**-**

Catatan: Estimasi berdasarkan Survei BPS

https://maluku.bps.go.id

Tabel 25. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa, Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku (rupiah), 2022 dan 2023

RINCIAN	2022		2023
	Anggaran	Realisasi	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PENDAPATAN	**122 600 655 762**	**108 032 159 992**	**123 867 803 648**
1. Pendapatan Asli Desa	-	-	-
2. Pendapatan Transfer	122 596 904 960	108 007 428 096	123 867 803 648
2.1 Dana Desa	71 349 534 720	68 326 555 648	69 484 347 392
2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	-	-	-
2.3 Alokasi Dana Desa	51 247 370 240	39 680 872 448	54 383 456 256
2.4 Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-
2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	-
3. Pendapatan Lain-lain	3 750 802	24 731 896	-
II. BELANJA DAERAH	**128 882 987 398**	**111 817 632 234**	**124 777 325 040**
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	50 869 982 584	39 223 536 056	52 828 279 328
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	34 237 823 142	32 096 890 598	34 950 553 560
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	5 543 293 752	4 477 655 032	7 185 168 752
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	12 780 947 248	11 404 004 564	17 079 643 528
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	25 450 940 672	24 615 545 984	12 733 679 872
III. PEMBIAYAAN	**6 282 338 816**	**5 031 233 024**	**909 524 096**

Catatan: Estimasi berdasarkan Survei BPS

https://maluku.bps.go.id

Tabel 26. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa, Kota Ambon Provinsi Maluku (rupiah), 2022 dan 2023

RINCIAN	2022		2023
	Anggaran	Realisasi	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PENDAPATAN	**92 812 586 560**	**81 611 075 200**	**100 075 932 816**
1. Pendapatan Asli Desa	1 090 402 480	1 106 519 792	1 128 156 304
2. Pendapatan Transfer	91 574 450 176	80 365 430 784	98 947 776 512
2.1 Dana Desa	27 209 754 624	27 209 754 624	31 573 381 680
2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	-	-	-
2.3 Alokasi Dana Desa	64 364 695 552	53 155 676 160	67 373 944 832
2.4 Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-
2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	-
3. Pendapatan Lain-lain	147 733 904	139 124 624	-
II. BELANJA DAERAH	**96 470 106 510**	**78 561 778 686**	**100 075 932 816**
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	43 522 698 844	37 642 560 272	45 628 872 464
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	22 557 855 838	16 514 653 050	26 016 099 176
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	4 962 368 224	2 835 192 084	5 675 513 654
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	12 533 266 100	9 418 883 584	15 044 940 176
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	12 893 917 504	12 150 489 696	7 710 507 346
III. PEMBIAYAAN	**3 657 520 640**	**3 677 395 456**	**-**

Catatan: Estimasi berdasarkan Survei BPS

https://maluku.bps.go.id

Tabel 27. Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa, Kota Tual Provinsi Maluku (rupiah), 2022 dan 2023

RINCIAN	2022		2023
	Anggaran	Realisasi	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)
I. PENDAPATAN	**52 001 044 480**	**50 472 194 048**	**45 334 491 136**
1. Pendapatan Asli Desa	-	-	-
2. Pendapatan Transfer	52 001 044 480	50 472 194 048	45 334 491 136
2.1 Dana Desa	23 536 302 080	23 536 302 080	22 044 925 952
2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	-	-	-
2.3 Alokasi Dana Desa	28 464 742 400	26 935 891 968	23 289 565 184
2.4 Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-
2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	-	-	-
3. Pendapatan Lain-lain	-	-	-
II. BELANJA DAERAH	**52 001 043 499**	**30 854 235 070**	**48 444 821 621**
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	20 617 149 344	14 710 620 670	19 651 931 168
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	7 375 100 948	2 706 373 248	12 979 947 688
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	7 734 848 320	5 969 183 552	4 951 600 240
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	9 893 845 816	4 413 289 472	5 862 273 853
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	6 380 099 071	3 054 768 128	7 999 068 672
III. PEMBIAYAAN	**-**	**-**	**3 187 462 064**

Catatan: Estimasi berdasarkan Survei BPS

https://maluku.bps.go.id

https://maluku.bps.go.id

RELATIVE STANDARD ERROR

https://maluku.bps.go.id

(0911) 361 320 www.maluku.bps.go.id bps8100@bps.go.id

https://maluku.bps.go.id

Relative Standard Error (RSE) Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Desa Menurut Kabupaten di Provinsi Maluku (Persen), 2022 dan 2023

Kabupaten/Kota		Anggaran 2022		Realisasi 2022		Anggaran 2023	
		Pendapatan	Belanja	Pendapatan	Belanja	Pendapatan	Belanja
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	Kepulauan Tanimbar	26,07	26,09	26,11	26,06	26,48	26,38
02	Maluku Tenggara	21,94	21,94	21,95	21,94	22,03	22,02
03	Maluku Tengah	24,77	24,77	24,76	24,76	25,02	25,02
04	Buru	27,46	27,46	27,46	27,46	27,58	27,59
05	Kepulauan Aru	26,99	27,13	26,93	27,19	27,97	27,79
06	Seram Bagian Barat	37,57	37,03	37,83	37,37	33,07	33,57
08	Maluku Barat Daya	27,38	27,58	27,45	27,61	27,36	27,36
09	Buru Selatan	28,28	28,50	28,32	28,43	28,21	28,20
71	Ambon	32,77	32,99	32,83	33,05	33,06	33,06
72	Tual	36,98	36,98	37,25	38,37	37,42	37,55
Maluku		**9,44**	**9,48**	**9,52**	**9,59**	**9,14**	**9,17**

https://maluku.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://maluku.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU

(0911) 361 320
www.maluku.bps.go.id
bps8100@bps.go.id